

## Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)

Saparutdin Brutu<sup>1</sup> Johana Adriani Nainggolan<sup>2</sup> Gelora Rehliasta Sembiring<sup>3</sup> Wulan Ayu Trisna<sup>4</sup> Geby Nainggolan<sup>5</sup> Putri Andini<sup>6</sup> Prayetno<sup>7</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [saparutdinbrutu@gmail.com](mailto:saparutdinbrutu@gmail.com)<sup>1</sup> [johanaandriani538@gmail.com](mailto:johanaandriani538@gmail.com)<sup>2</sup> [gelorasembiring060@gmail.com](mailto:gelorasembiring060@gmail.com)<sup>3</sup> [wulanayutrisna@gmail.com](mailto:wulanayutrisna@gmail.com)<sup>4</sup> [gebyan04@gmail.com](mailto:gebyan04@gmail.com)<sup>5</sup> [putriandini040703@gmail.com](mailto:putriandini040703@gmail.com)<sup>6</sup> [prayetno@unimed.ac.id](mailto:prayetno@unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tercapainya suatu pemerintahan yang demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah status ekonomi. Dengan demikian, tinggi rendahnya tingkat ekonomi akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada masyarakat di Dusun I Desa Bandar Klippa Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan status ekonomi terhadap partisipasi politik warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi politiknya, masyarakat yang cenderung memiliki ekonomi yang tidak stabil akan lebih rentan untuk menerima money politik sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini status ekonomi yang cenderung menengah ke bawah memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

**Kata Kunci:** Status Sosial Ekonomi, Partisipasi Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang berdaulat yang menganut paham demokrasi, yang salah satu asasnya ialah pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, bebas dan adil. Sejarah pemilu juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrumen demokrasi tersebut. Partisipasi politik dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). (Mahmud, S. 2023) Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan politik (golput) dalam pemilu. Sebagai arena kompetisi politik, pelaksanaan pemilu di Republik Indonesia dari awal pasca kemerdekaan hingga sekarang, banyak diwarnai oleh tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak, baik pada aktor politik maupun pada masyarakat. (Mahmud, S. 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut rendahnya tingkat partisipasi politik dalam sosial ekonomi menyebabkan adanya golput hal itu karena menurunnya kemiskinan, pendidikan, pengetahuan dan belum memahami hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang baik. Masyarakat beranggapan memilih atau tidak memilihnya calon pemimpin tidak berpengaruh apa-apa bagi hidupnya, mereka bersikap apatis dan kurang bersemangat dalam melakukan pemilihan umum di desa. Namun mereka berharap diberikan uang atau barang untuk membantu perekonomian masyarakat. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. (Kustiana, P. B. A. (2021).

Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politisi maupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara maupun partai yang berkuasa. (Yuningsih, N. A. I. 2014). Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M partisipasi politik dipengaruhi oleh pertama, Budaya politik masyarakat setempat. Ini terkait dengan beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat seperti nilai adat dan nilai tradisi, agama, dll. Kedua, partisipasi dipengaruhi juga oleh status sosial. Status sosial meliputi pendidikan, ekonomi, dan kelas sosial masyarakat. (Darna, N. 2019). Pada negara-negara demokrasi umumnya dianggap tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dalam Pemilu, tingkat partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka. (Kustiana, P. B. A. (2021).

Di negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, proses demokratisasi telah terlihat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan berpendapat oleh setiap warga negara yang berarti bahwa warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, masukan, kritikan dan saran serta memberi intervensi terhadap perjalanan negara. Saat ini, pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat atau presiden dan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat, maka partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam kegiatan pemilihan umum ini. (Abdullah, N. 2016).

Sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan terjadi politik uang. Praktik politik uang merupakan praktek ilegal dalam pemilu seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang kuat, merupakan sesuatu hal yang tidak perlu ditakutkan oleh masyarakat dan menganggap hal itu sesuatu yang lumrah dan wajar (Sukmajati, 2016). Oleh karena masyarakat menganggapnya sebagai budaya tiap pemilu, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik politik uang. Masyarakat membiarkan praktik-praktik politik uang berkembang dan tidak merasa hal tersebut merupakan tindakan yang perlu di jauhi karena akan merusak citra demokrasi dan menciptakan pemimpin yang tidak jujur, adil dan berunjuk pada pemimpin yang korup. Sampai sejauh ini realitas budaya politik sebagian besar masyarakat khususnya di daerah –daerah pedesaan belum sepenuhnya bersifat paternalistik, belum sepenuhnya bersifat rasional dalam

menyalurkan hak-hak politiknya dan kepentingannya. Berdasarkan realitas ini maka proses pemilu belum menjamin kualitas daripada kandidat yang merupakan wakil rakyat (legislatif). (Laia, M., Kusmanto, H., et, al.2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut masih banyak khalayak yang melakukan secara sadar dalam menerima politik uang dari calon kandidat. Adanya politik uang yang dijanjikan serta diberikan oleh calon pemimpin menyebabkan masyarakat ikut melakukan partisipasi politik, tetapi bukan memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya namun hanya karena uang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat yang menurun. Sehingga mereka tidak ada pilihan lain selain menerima uang atau sogokan yang diberikan calon pemimpin. Hal itu disebabkan meningkatnya kebutuhan ekonomi, kemiskinan dan menurunnya pendapatan dalam suatu keluarga. Masyarakat pada umumnya memiliki kesamaan hak untuk memilih akan tetapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya yaitu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi masyarakat. Tidak secara keseluruhan masyarakat memiliki status sosial ekonomi yang setara, tetapi pasti ada perbedaan. Status sosial ekonomi yang penulis maksudkan adalah posisi atau kedudukan sosial ekonomi seseorang atau keluarga di dalam kehidupan bermasyarakat. Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran tersebut seperti tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya. Tentunya secara umum, seseorang atau keluarga yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi atau lebih baik akan berpartisipasi lebih aktif dibandingkan dengan seseorang atau keluarga dengan status sosial ekonominya lebih rendah.(Abdullah, N. 2016).

Selain dari status sosial ekonomi tersebut, partisipasi politik masyarakat dipengaruhi pula oleh sosialisasi politik melalui media massa yang terdapat dalam masyarakat. Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik dapat pula melatih individu dalam menginternalisasi nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Dengan sosialisasi politik melalui media massa dapat memberikan kemudahan informasi dan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat kota atau pemerintahan, sehingga ini bertujuan agar proses pemilihan umum tersebut bisa berjalan dengan lancar dan merata. (Abdullah, N. 2016).

Status sosial ekonomi merupakan suatu bentuk pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik tingkat pendidikan, kedudukan/posisi seseorang, pendapatan dan pemilikan kekayaan. Sedangkan sosialisasi politik melalui media massa merupakan suatu proses dengan mana sikap-sikap, nilai-nilai dan pengetahuan politik yang ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa melalui sarana media massa. Kedua hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. (Abdullah, N. 2016). Kualitas suatu pemilihan dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih/masyarakat. Namun partisipasi politik bukan hanya dilihat dari berapa jumlah masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah, tetapi bagaimana antusias masyarakat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Siapa saja yang aktif mengikuti kegiatan -kegiatan politik, seperti mengikuti diskusi-diskusi mengenai perpolitikan, menjadi anggota partai politik, dan hadir atau ketidakhadirannya.

Seseorang yang mempunyai kesadaran politik yang cukup besar dan memiliki pengetahuan mengenai politik yang cukup luas, dan sadar akan haknya sebagai warga negara maka ia akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, tidak lagi memikirkan status sosial ekonomi yang mereka miliki. Sehingga jika masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik. Menurut Surbakti (1999:144) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya

partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. (Tamara, G. A. 2016). Menurut Ramlan Surbakti tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang disebabkan oleh, pertama, status sosial ekonomi (SSE) yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, bahwa mereka yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi lebih berpartisipasi. Kedua, faktor kesadaran politik, yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah seseorang paham informasi politik dan seberapa penting politik bagi mereka, karena jika seseorang paham mengenai politik dan menganggap politik itu penting mereka akan ikut berpartisipasi dalam politik.

Sebagaimana diungkapkan dalam penelitiannya oleh Frank Lindenfeld (Maran, 2014: 156), menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki keamanan ekonomi. Sebaliknya, dalam penelitian Lipset dan Deutsch (Budiharjo, 1998:9) dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan, dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. (Kustiana, P. B. A. (2021). Berdasarkan hal tersebut faktor yang menyebabkan masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi politik adalah kepuasan finansial, akibat pengaruh sosial ekonomi masyarakat yang menurun mereka mengharapkan politik uang yang diberikan calon pemimpin. Akibat kemiskinan yang semakin menurun mereka tidak ada pilihan lain selain menerima uang sogokan dari calon pemimpin. Mereka bersikap apatis dan tidak mepedulikan kelayakan calon pemimpin yang di pilih tetapi mereka memilih pemimpin berdasarkan nominal barang dan uang yang dijanjikan.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada Pemilihan umum tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal dan berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun meluasnya perubahan tersebut terhadap partisipasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Verba dan Nie (dalam Mujani, 2007:272-274) mengatakan bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi. Hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dijelaskan dalam temuan Conway (1985:19-24) pada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. (Putra, A. at.al 2019). Artinya status sosial ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas dan berdasarkan beberapa penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi politik, menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bandar Klippa, kecamatan Percut Sei Tuan. dikarenakan masyarakat yang menggunakan hak pilih terdiri dari berbagai status sosial ekonomi yang berbeda-beda sehingga memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon legislatif. Oleh sebab itu, maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul " Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus Desa Bandar Klippa, kecamatan Percut Sei Tuan)":

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Sosial Ekonomi di Masyarakat Bandar Klippa**

Desa Bandar Klippa, dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani dan tukang, menunjukkan lanskap sosial ekonomi yang cenderung menengah ke bawah. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik di desa tersebut. Keterlibatan dalam sektor ekonomi yang terbatas, serta ketergantungan pada sektor informal, bisa mempengaruhi kesempatan partisipasi politik. Selain itu, aspek pendidikan juga dapat menjadi poin kunci dalam mengevaluasi pengaruh sosial ekonomi terhadap partisipasi politik warganegara. Akses terhadap pendidikan yang terbatas atau kualitas pendidikan yang rendah mungkin menjadi hambatan bagi masyarakat desa dalam memahami, terlibat, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, dan sarana transportasi juga dapat mempengaruhi partisipasi politik warga desa.

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Desa Bandar Klippa dapat menjadi tantangan yang mempengaruhi kesetaraan dalam partisipasi politik. Banyaknya penduduk yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu bisa mengakibatkan keterbatasan dalam partisipasi politik mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi representasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan, baik dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta memperkuat partisipasi politik warga desa. Langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman politik, kesadaran akan hak-hak politik, dan penyediaan platform partisipasi yang inklusif menjadi krusial dalam rangka meningkatkan keterlibatan politik masyarakat desa, memastikan representasi yang adil, serta pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial dan ekonomi.

Pengaruh sosial ekonomi terhadap partisipasi politik warga negara merupakan topik yang menarik untuk dianalisis, terutama ketika diterapkan pada studi kasus di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang aspek sosial ekonomi dalam konteks partisipasi politik penduduk desa ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Berdasarkan hasil riset peneliti kondisi sosial ekonomi bahwa mayoritas bekerja sebagai kuli bangunan dan petani. Pendapatan masyarakat dibawah UMR yaitu perminggu gaji tukang adalah 130 ribu. Namun kondisi ekonomi pada masyarakat masih kurang karena mereka kebanyakan 1 Minggu kerja dan 2 Minggu tidak bekerja dikarenakan tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu masyarakat dusun 1 desa bandar Klippa inilah masyarakatnya banyak yang tidak mampu oleh karena itu di dusun 1 ini paling banyak mendapatkan bantuan seperti PKH hingga BLT atau keluarga tidak mampu. Dalam partisipasi politik Masyarakat Desa bandar Klippa adalah kecamatan Percut No 2 tersebar di Indonesia yaitu dalam 1 desa ada 34.0000 kartu keluarga yang wajib memilih maka penduduk pemilih paling banyak adalah di Tembung karena desa bandar Klippa termasuk padat penduduk.

Dalam pemilu mengenai money politik dan golputnya tergolong stabil, dengan hal itu perangkat desa mengupayakan untuk meminimalisir golput, di dusun 1 desa bandar Klippa ini golputnya tergolong stabil karena berdasarkan riset contoh undangan pemilu yang diberikan

perangkat desa adalah 300 undangan dan yang datang untuk menentukan hak pilihnya adalah 250 orang dengan hal tersebut golput di desa ini termasuk stabil. Namun perangkat desa terus memberikan kepeduliannya untuk masyarakatnya tentang pentingnya melakukan hak pilih. Money politik di desa bandar Klippa dusun 1 ini tentu pasti ada, perangkat desa atau kepala dusun juga menerima dan mendukung jika ada caleg yang mau membantu membangun masjid. Oleh karena itu kondisi soal ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi politik.

### **Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan pondasi penting dari sistem demokrasi, memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Ini adalah cara bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, menciptakan perubahan, dan mempengaruhi arah kebijakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik yang bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi dalam pemilihan umum, diskusi kebijakan, gerakan sosial, hingga bentuk-bentuk lain dari ekspresi politik. Faktor-faktor yang dapat mendukung partisipasi politik di suatu komunitas, seperti Desa Bandar Klippa, dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Kesadaran Politik: Kesadaran politik memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi politik. Ketika warga memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik lokal dan nasional, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses politik.
2. Keterbukaan dan Akses Informasi: Akses yang mudah terhadap informasi tentang kandidat, isu politik, dan proses politik secara umum dapat mendorong partisipasi. Medan informasi yang terbuka, termasuk media massa dan platform online, dapat memberikan akses lebih luas kepada warga.
3. Pendidikan Politik dan Keterampilan Partisipasi: Pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dapat memotivasi individu untuk terlibat lebih aktif. Pelatihan keterampilan partisipasi politik, seperti keterampilan debat, pemecahan masalah, dan negosiasi, juga dapat memperkuat keterlibatan politik.
4. Partisipasi dalam Organisasi Masyarakat: Terlibat dalam organisasi masyarakat, seperti kelompok advokasi atau LSM lokal, bisa memperkuat keterlibatan politik. Ini memungkinkan warga untuk secara aktif terlibat dalam isu-isu yang mereka pedulikan.
5. Pertemuan dan Diskusi Komunitas: Pertemuan lokal, forum, atau diskusi komunitas dapat menjadi platform di mana warga dapat berbagi pandangan, ide, dan kekhawatiran mereka. Ini dapat memicu keinginan untuk terlibat dalam upaya perubahan politik.
6. Kepemimpinan Karismatik dan Inspiratif: Kepemimpinan yang karismatik dapat memotivasi partisipasi politik. Ketika ada figur publik yang dapat menginspirasi warga dengan visi dan tujuan yang jelas, mereka cenderung mengikuti jejak dan terlibat dalam proses politik.
7. Kepercayaan pada Sistem Politik: Kepercayaan warga terhadap integritas dan kemampuan institusi politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi partisipasi politik mereka. Kepercayaan yang tinggi cenderung memotivasi partisipasi yang lebih aktif.

Memahami faktor-faktor ini dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi politik di Desa Bandar Klippa atau komunitas sejenis. Ini dapat juga membantu dalam merumuskan kebijakan atau program yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan berkelanjutan.

### **Kualitas Partai Politik di Bandar Klippa**

Kualitas partai berperan dalam meningkatkan partisipasi politik di bandar khalipa dalam pemilihan caleg-caleg yang ada di desa tersebut, di mana kualitas partai terdiri atas pendidikan politik dimensi kognitif berperan dalam meningkatkan partisipasi politik dengan kategori cukup. Banyak juga calon ataupun anggota-anggota partai politik di desa bandar khalipa tersebut Siapa orang partisipasi politik juga memiliki kategori untuk memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik yaitu kualitas partai Dalam penelitian ini terdiri dari pendidikan politik yang kognitif dan juga pendidikan politik sikap dan ideologi partai yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bandar Khalifah. Partai politik di Bandar Khalifah juga merupakan salah satu kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena salah satu isinya adalah tentang hubungan antar warga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut warga negara partai politik, dan warga negara khususnya di daerah yaitu terkait partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan pada caleg-caleg tersebut.

Beberapa partai hal tersebut sesuai dengan hubungan warga negara pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma baru dalam demokrasi yang memiliki tiga fungsi pokok salah satunya adalah Civic participation atau mendorong partisipasi warga negara (Sapriya dan Winata putra, 2007:1.1). Partisipasi juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yaitu kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah titik partisipasi politik pada warga negara juga perlu mendapatkan ruang yang luas, bukan hanya terbatas pada saat Pemilu atau partisipasi 5 tahun, akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan publik. Mekanisme dalam struktur formal pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mewujudkan kondisi tersebut titik dalam sebuah demokrasi yang kuat, partisipasi bukan se kedar mempertahankan kepentingan, melainkan merupakan suatu proses publik yang matang, yang tidak mengklaim suatu kebenaran melebihi yang disetujui secara konsensus oleh warga negara.

Partai politik juga merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara untuk negara yang menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan titik partai politik juga merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan terselenggaranya kehidupan bernegara yang demokratis. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga merupakan Wahana bagi penampungan aspirasi masyarakat bandar kalipa. Peran tersebut juga merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara titik Pendidikan Kewarganegaraan Dalam pengertian yang luas yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru dan di luar sekolah baik yang berupa program Penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik program dari partai politik dengan salah satu fungsinya adalah wadah partisipasi politik warga negara.

Kegiatan partai politik kebanyakan hanya sebatas sosialisasi khususnya menjelang pemilihan umum dan dalam sosialisasi tujuan yang ingin dicapai hanya sebatas mendapatkan suara titik hasil temuan dalam penelitian ini ditemukan media media yang digunakan partai politik ataupun kandidat masih belum mendidik warga negara seperti kampanye dengan dangdutan dan dapat beberapa partai yang melakukan pelatihan itu pun dibatasi hanya untuk

mengurus dan waktunya sekali sebelum ada Pemilu. Partisipasi politik masyarakat juga perangsang yang merupakan cerminan masyarakat yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di serta nilai kejujuran tidak ada titik antar partai politik perlu adanya kesepakatan tentang batas-batas *cost politic* ya itu dalam ukuran minimal pembuatan atribut kampanye seperti baliho spanduk, kaos dan juga cetak lainnya. Kenyataannya pemberian materi dan uang sebenarnya sudah sulit dihindari karena anggapan umum sudah sepakat untuk menanggapinya sebagai suatu kewajiban, maka dianggap sebagai konsekuensi suatu pertandingan, sehingga tidak dianggap pelanggaran titik Dengan demikian dapatlah ditarik suatu definisi bahwa ongkos politik adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat atau aktivis politik dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan politik tertentu.

### **Status Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara**

Status sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap partisipasi politik warga negara di dusun 1 desa bandar klippa kecamatan percut sei tuan. Penelitian ini menemukan ternyata status pendidikan, pendapatan, dan perbedaan jenis pekerjaan (non petani dibandingkan dengan petani) berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tersebut. Masyarakat desa yang memiliki status ekonomi dan pendidikan yang tinggi akan lebih banyak berpartisipasi aktif menjelang pemilihan umum dan akan lebih tau arah pilihannya sesuai dengan gagasan calon kandidat yang diberikan. Masyarakat yang ekonominya dan pendidikannya yang sudah mumpuni akan sulit untuk menerima money politik dari paslon yang akan berbuat curang dalam pemilu hal ini dilatarbelakangi dengan kestabilan ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Sedangkan masyarakat yang ekonominya yang masih pas-pasan serta pendidikan yang di dapat masih tergolong rendah akan mempengaruhi arah suara yang diberikan dan golongan masyarakat seperti ini kerap kali menjadi sasaran empuk bagi paslon yang ingin berbuat curang dalam pemilu maupun pilkada untuk mendulang suara yang lebih besar bermodalkan serangan fajar yang berikan kepada masyarakat yang kurang mampu tadi.

Masyarakat yang kurang mampu tidak mempunyai pilihan bahwa ia harus menerima money politik tersebut demi melengkapi kebutuhan hidup sebab kurangnya pendapatan sehari-hari, apalagi melihat masyarakat di dusun I desa bandar Klippa kebanyakan berprofesi sebagai buruh, kennek bangunan, supir angkot, dan petani. Melihat dari kepadatan penduduk di desa bandar klippa yang usia pemilihnya mencapai 34.000 seharusnya ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintah untuk lebih memetakan pemerataan pembangunan, pemerataan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar bantuan tersebut dapat meringankan dan bermanfaat bagi masyarakat. dan perhatian pemerintah untuk pendidikan untuk lebih meningkatkan mutu sumber daya manusia di desa ini. Selayaknya menjelang pemilihan umum 2024 KPU juga harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu agar masyarakat dapat dibekali dengan pendidikan politik sehingga sejatinya masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai dengan gagasan yang telah ditawarkan dan bukan karena faktor dorongan money politik masyarakat mau memilih namun harus berdasarkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

### **KESIMPULAN**

Desa Bandar Klippa merupakan sebuah komunitas dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan tukang. Kondisi ekonomi yang cenderung menengah ke bawah memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik di desa ini. Keterlibatan terbatas dalam sektor ekonomi dan ketergantungan pada sektor informal dapat membatasi kesempatan partisipasi politik. Faktor pendidikan juga menjadi relevan, karena

akses terbatas atau kualitas pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan dalam memahami dan terlibat dalam kegiatan politik. Kesenjangan sosial ekonomi di Desa Bandar Klippa menciptakan tantangan dalam mencapai kesetaraan partisipasi politik. Mayoritas penduduk dengan kondisi ekonomi kurang mampu menghadapi keterbatasan dalam partisipasi politik mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi representasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat partisipasi politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik di Desa Bandar Klippa melibatkan kesadaran politik, keterbukaan dan akses informasi, pendidikan politik, partisipasi dalam organisasi masyarakat, pertemuan komunitas, kepemimpinan karismatik, dan kepercayaan pada sistem politik. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam konteks kualitas partai politik di Bandar Klippa, pendidikan politik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi politik. Partai politik di Desa Bandar Klippa juga berperan sebagai wahana untuk penampungan aspirasi masyarakat, namun masih ada tantangan terkait dengan sosialisasi yang belum memadai dan penggunaan dana kampanye yang perlu diatur lebih baik.

Saran: Desa Bandar Klippa, didominasi oleh petani dan tukang, menghadapi kendala partisipasi politik karena kondisi ekonomi menengah ke bawah dan keterbatasan akses pendidikan. Untuk mengatasi ini, perbaikan sosial ekonomi dan peningkatan mutu pendidikan menjadi krusial. Selain itu, melalui kesadaran politik, keterbukaan informasi, dan pendidikan politik, masyarakat bisa terlibat lebih aktif dalam organisasi, pertemuan komunitas, serta menciptakan pemimpin yang karismatik. Reformasi dalam partai politik juga penting, dengan pengaturan dana kampanye yang lebih transparan dan peningkatan sosialisasi. Pentingnya memperhatikan inklusivitas dalam sosialisasi menjelang pemilihan umum juga disoroti. Harapannya adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu-ibu Majelis Taklim dan kelas ekonomi menengah ke bawah. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial ekonomi, pendidikan, kualitas partai politik, dan antusiasme masyarakat akan membantu membangun partisipasi politik yang lebih kuat di Desa Bandar Klippa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1627-1636.
- Abdullah, N. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1627-1636.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darna, N. (2019). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*.
- Erwinsyahbana, T. (2018). *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Kustiana, P. B. A. (2021). Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang Dalam Pemilihan Umum 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 275-286.
- Laia, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi

- terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 416-423.
- Mahmud, S. (2023). Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Keturunan Tionghoa dalam Pilkada di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(1), 101-107.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta Rineka Cipta
- Purnama, R., & Dewi, M. T. F. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 245-256.
- Purnama, R., & Dewi, M. T. F. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 245-256.
- Putra, A. N. E., & Adnan, M. F. (2019). Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Padang Tahun 2018. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 3(1), 18-27.
- Siahaan, N. (2016). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Asahan Tahun 2015 (Studi Analisis Pada Masyarakat Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Tahun 2015)* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Sitompul, N. P. (2007). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus: Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tamara, G. A. (2016). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 (Studi perbandingan Kelurahan Way Urang dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Wirahmat, H. (2013). *Analisis tingkat partisipasi politik masyarakat di tinjau dari status sosial ekonomi (studi kulurahan tamangappa Kota makassar)*. (UIN Alauddin Makassar).
- Yuningsih, N. A. I. (2014). *Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. *Kajian moral dan kewarganegaraan*, 2(1), 16-30.